



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TURIKALE
KELURAHAN ADATONGENG

Alamat : Jl. Poros Mks – Maros Km. 27 Maros Tlp. (0411) 373588 KP. 90511

KEPUTUSAN LURAH ADATONGENG

Nomor : 24.a /04.1010/ADT/KPTS/II/2026

TENTANG

**PENGELOLA PERPUSTAKAAN KELURAHAN ADATONGENG
KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS**

LURAH ADATONGENG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola Perpustakaan kelurahan dipandang perlu menunjuk Petugas Perpustakaan Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);

4. Peraturan Menteri Desa/Kelurahan, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa/Kelurahan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa /Kelurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa/Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa /Kelurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Desa/Kelurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa /Kelurahan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 961);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Maros Nomor 91 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa /Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 92), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 115 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 91 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 115)
17. Peraturan Bupati Maros Nomor 92 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa /Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 93), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 116 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 92 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa /Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 117)
18. Peraturan Bupati Maros Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 24);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa/Kelurahan Tahun 2023
20. Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa /Lurah
21. Peraturan Bupati Maros Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa
22. Peraturan Bupati Maros Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa /Kelurahan di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Maros Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2023;
24. Keputusan Bupati Maros Nomor 1269/KP/PS/412.2/XII/2022 tentang Penetapan Besaran Pembagian Pagu Belanja Pada Alokasi Dana Desa /Kelurahan se-Kabupaten Maros Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengelola Perpustakaan Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
- KEDUA : Mengangkat yang tersebut namanya sebagai Pengelola Perpustakaan Kelurahan, Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
- KETIGA : Tugas pengelola perpustakaan Kelurahan sebagaimana dalam diktum KEDUA keputusan ini :
1. Menginventarisasi Perpustakaan Kelurahan;
 2. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Dana Kelurahan Tahun 2026
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pengangkatan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Adatongeng
Pada tanggal : 02 Februari 2026
LURAH ADATONGENG,



GASSING NINRI, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19730423 200701 1 016

Tembusan : disampaikan Kepada YTH :

1. Bapak Bupati Maros
2. Ketua DPRD Maros
3. Camat Turikale
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KELURAHAN ADATONGENG
NOMOR : 24.a /04.1010/ADT/KPTS/II/2026
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2026
TENTANG : **PENGELOLA PERPUSTAKAAN
KELURAHAN ADATONGENG
KECAMATAN TURIKALE
KABUPATEN MAROS**

**PENGELOLA PERPUSTAKAAN KELURAHAN BONTOA
KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS**

